

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Oknum Pejabat DKI Cari Tambahan dari Pengadaan Barang dan Jasa

Inspektorat harus memeriksa temuan tersebut dan di-pemeriksa karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan. "Kami sering mendapat informasi masih ada pejabat DKI Jakarta berupaya mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK, Alex-

ander Marwata, di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/12).

Namun, Alexander tidak memberi detail identitas pejabat yang masih berupaya mendapat uang dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan tersebut. Dia menyayangkan tindakan tersebut karena penghasilan pejabat DKI salah satunya setingkat kepala dinas yang tergolong tinggi. Mereka di atas rata-rata daerah lain.

"Tingkat kesejahteraan, penghasilan jauh di atas rata-rata. Bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ucapnya. Alex pun mendorong Inspektorat DKI Jakarta menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus. Ini harus dilakukan pemeriksaan karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.

"Titik paling rawan kebocoran anggaran ya terkait pengadaan barang dan jasa, selain

menyangkut perizinan di Pemprov DKI," katanya. Bahkan, Alexander yang memiliki akses membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik pusat maupun daerah, termasuk Pemprov DKI, menyebutkan ada pejabat

« Titik paling rawan kebocoran anggaran ya terkait pengadaan barang dan jasa, selain menyangkut perizinan di Pemprov DKI. »

ALEXANDER MARWATA

Wakil Ketua KPK

yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah. Jumlahnya sampai 20-25 bidang tanah.

Wakil Ketua KPK ini pun mempertanyakan kewajaran pejabat memiliki tanah yang banyak tersebut. "Ini banyak. Saya lihat pejabat Pemprov DKI

punya tanah berpuluh bidang. Ini mudah-mudahan dari hasil yang halal," tutur Alexander. Untuk itu, KPK menempatkan tiga satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI.

Selain atas permintaan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, penambahan satgas juga mencermati APBD Pemprov DKI yang sangat besar mencapai 80 triliun lebih. Ini setara APBD seluruh Provinsi Pulau Sumatera. Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, mengatakan terkait LHKPN DKI Jakarta, para pejabatnya sudah rutin melaporkan harta kekayaan.

Heru pun yakin pejabat DKI sudah melaporkan harta kekayaannya melalui inspektorat. "Saya rasa melalui inspektorat semuanya sudah melapor, termasuk saya. Dari tahun 2000 atau 2002 saya selalu melaporkan LHKPN. Nanti laporannya Januari, Februari, untuk posisi 2022. Saya rasa pejabat DKI semua sudah melapor," ungkap Heru.

Tambah Satgas

Untuk mengawasi anggaran, KPK menambah personel satuan tugas (satgas) dari satu menjadi tiga orang. Mereka bertugas mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI mulai 2023. Tambahan ini atas permintaan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.

"Tujuannya sama, supaya kebocoran bisa dicegah sejak awal," kata Alexander. Nantinya, satgas dibagi tugas. Dua orang mengawasi pengelolaan APBD. Satu orang mengawasi pengelolaan anggaran BUMD. Menurut dia, selama ini satu provinsi diawasi satu petugas KPK.

Heru menjelaskan penambahan personel satgas akan memperkuat tugas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan BUMD Jakarta. Selain itu, keberadaan satgas akan menjadi pengingat agar selalu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mencegah korupsi.

■ Ant/wid/G-1